



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUTU EKA SUDARYATMA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 1010020

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.735.000.000

1. Tanah Seluas 139 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI
Rp. 135.000.000
2. Tanah Seluas 101 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
DENPASAR , HADIAH Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 275.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS 1.5 GT Tahun 2013, HADIAH Rp.
65.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V AT Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, HONDA ADV160 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 55.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.200.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 73.714.513

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.338.714.513

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.338.714.513

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.